

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

1. Sejarah ringkas Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

Dinas Koperasi dulunya dikenal sebagai Departemen Koperasi dan LPK. Sejak tahun 2003 adanya otonomi daerah maka dari Departemen Koperasi Daerah berubah menjadi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Keadaan terhadap Dinas Koperasi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tepatnya tahun 2008 Dinas Koperasi berubah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM sampai akhir tahun 2016. Dan pada akhir tahun 2016 merupakan momentum perubahan kembali terhadap Dinas Koperasi dan UMKM yakni yang pada awalnya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja berpisah sejak tahun 2008 maka disatukan kembali dengan nama instansi pemerintahan menjadi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan berlandaskan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah.

2. Visi dan Misi

Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah terwujudnya Koperasi Usaha Mikro yang berkualitas dan terciptanya Tenaga Kerja produktif serta berdaya saing untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

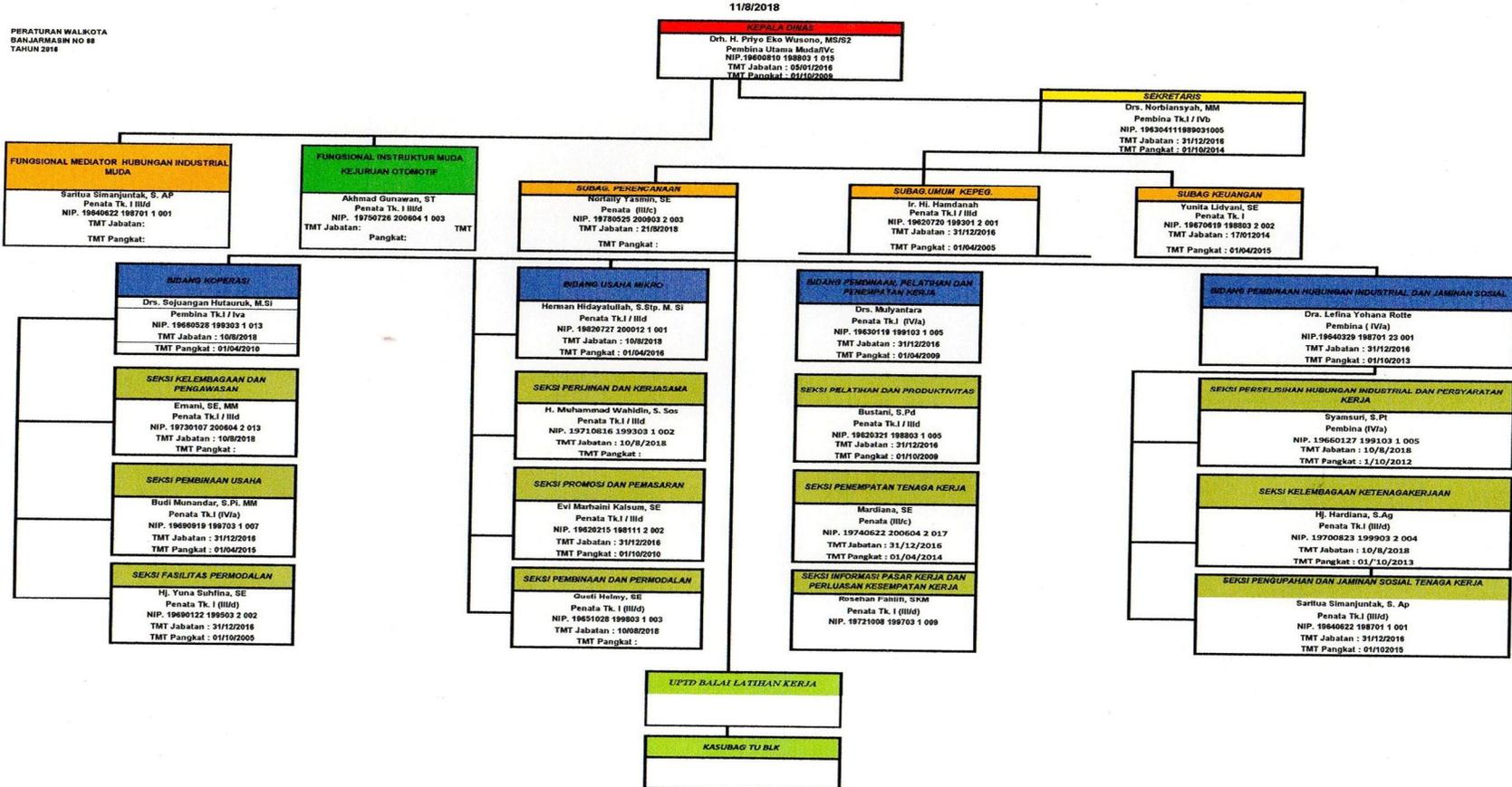
Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah:

- a. Meningkatkan sumber daya Manusia dan Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing.
- b. Memberdayakan potensi yang dimiliki pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap sumber-sumber permodalan.
- d. Meningkatkan kemitraan atau kerja sama antar Koperasi, Usaha Mikro serta pelaku ekonomi lainnya untuk perluasan pasar.
- e. Mewujudkan peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja.
- f. Mendorong terlaksananya penyerapan Tenaga Kerja guna mengurangi pengangguran terbuka.
- g. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
- h. Menjamin terwujudnya perlindungan Tenaga Kerja.¹

¹Data diperoleh dan diolah oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN



Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

4. Program-program Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

a. Program Koperasi

Adapun selain program pendampingan KUR dinas koperasi juga memiliki program lainnya, yaitu :

- 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- 2) Program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan penyebaran informasi bursa kerja (job fair), perluasan kesempatan kerja
- 3) Program penciptaan iklim UMKM yang kondusif dengan kegiatan penciptaan dan pengembangan pusat expo
- 4) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dengan kegiatan penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan-pelatihan seperti pembuatan selai nanas. Revalasi laptop dan printer, telepon genggam, pembuatan tas sasingan, pembuatan jus buah, pembuatan souvenir kerajinan, percetakan sablon, pembuatan souvenir boneka, pembuatan rajut, pembuatan manisan buah, kue basah, bordir, dan menjahit
- 5) Program peningkatan dan pengembangan SDM promosi kemitraan dan jaringan dengan kegiatan berupa promosi produk koperasi dan UMKM seperti pameran, peningkatan kapasitas SDM dan UMK atau sasaran koperasi

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan tentang Pelaksanaan Program pendampingan KUR di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, maka diperoleh data identitas informan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Nama : Dra. Marta Darmayanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Pelaksana Perijinan dan Kerjasama
Tempat : Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Waktu : 10:00 Wita- Selesai
2. Nama : Isnawati
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Pelaksana
Tempat : Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Waktu : 11:00 Wita-Selesai

Gambaran dari Pelaksanaan Program pendampingan KUR di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Menurut hasil wawancara dengan bagian Pelaksanaan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin merupakan salah satu Dinas yang menjalankan Usaha di Banjarmasin. Adapun program yang terdapat di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sangat beragam, sama halnya dengan Dinas Koperasi pada umumnya, yaitu program pelaksanaan maupun pendampingan.

Pendampingan merupakan alat pemberdayaan yang dianggap ampuh dan efektif dalam membantu seseorang atau lembaga/organisasi dalam mewujudkan cita-citanya. Pendampingan merupakan kerjasama antara dua pihak yang didasarkan pada sikap saling percaya dan menghormati.

Yang dimaksud dengan pendampingan koperasi dan UMKM adalah kegiatan penguatan organisasi, kelembagaan dan usaha oleh pendampingan terhadap pelaku Koperasi dan UMKM sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Pendampingan Koperasi dan UMKM adalah Tenaga terlatih yang bertugas melakukan penguatan terhadap Pelaku Koperasi dan UMKM.

Pendampingan merupakan strategi yang umum yang dilakukan oleh lembaga baik instansi pemerintah, swasta maupun LSM untuk mendukung kesuksesan program. Pada kementrian Koperasi dan UKM, kita mengenal beberapa program yang hampir sama dengan program pendampingan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perizinan sangat membantu bagi pelaku UMKM untuk memudahkan dalam mengakses KUR,. Iklim usaha yang baik akan berdampak pada peningkatan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, dengan kata lain iklim yang kondusif menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk berusaha (berinvestasi) di Kota Banjarmasin akan meningkat. Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan untuk mendukung iklim usaha UMKM di Kota Banjarmasin yang meliputi aspek pendanaan, sarana

prasarana, informasi usaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan. Dengan adanya kegiatan tersebut akan memicu pertumbuhan UKM, kenaikan tersebut secara langsung akan memicu pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan pelaku UKM di Kota Banjarmasin juga tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Peran tersebut dapat terlihat dari sejauh mana upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan UMKM.

Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Banjarmasin yaitu mendukung dan memfasilitasi kegiatan temu bisnis antara pelaku UKM dan mitra perbankan serta lembaga keuangan dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat bisnis UKM dengan harapan meningkatnya jumlah volume usaha dan pasar produksi bagi pelaku UKM yang mengikuti kegiatan tersebut. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan UKM yaitu melalui kegiatan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud adalah memberikan pemahaman dan aktualisasi yang nyata untuk keberhasilan kegiatan untuk meningkatkan daya saing bagi pelaku UKM di Kota Banjarmasin dengan melakukan pelatihan kewirausahaan, bimbingan berwirausaha maupun fasilitasi bantuan informasi pemberian kredit perbankan melalui program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Program pendampingan KUR di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ini ialah merupakan fasilitas kredit bagi

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk kebutuhan investasi, modal kerja maupun untuk kebutuhan lainnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki beragam variasi dan fitur yang dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan usaha anda, misalnya untuk pertanian, perdagangan, pertambangan, industri, jasa dan pendidikan. Kementerian Koperasi dan UMKM dalam hal ini membidangi program KUR secara langsung memiliki tugas untuk memonitoring penyaluran dana KUR. Dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping tersebut Kementerian Koperasi dan UMKM membentuk tim pendamping KUR di daerah-daerah. Tim pendamping KUR dalam pelaksanaan tugasnya membantu UMKM agar dana KUR ini dapat terakses dengan baik. Beberapa tugas tim pendamping KUR antara lain : membantu sosialisasi program KUR ke UMKM, membantu menyiapkan syarat-syarat KUR bagi UMKM calon pengakses dana KUR, memfasilitasi UMKM berhubungan dengan Bank penyalur KUR. Dalam pelaksanaan tugasnya tim pendamping KUR tidak memungut biaya jasa sepeser pun karena tim pendamping KUR sudah mendapatkan insentif dari kementerian koperasi dan UMKM.

Adapun fungsi, peran dan tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yaitu:

- a. Melakukan observasi awal atau penjajakan kebutuhan pendampingan, yang dimaksud untuk mengetahui keadaan riil pelaku usaha atau UMKM dan lingkungannya. Hasil observasi menjadi masukan yang berharga untuk menyusun materi

pendampingan. Observasi awal menjadi momentum membangun komunikasi yang baik sehingga proses pendampingan berjalan tanpa hambatan.

- b. Melakukan tugas-tugas pendampingan, seperti: membimbing, mengoreksi, menasehati, dan memfasilitasi pelaku usaha atau UMKM agar tumbuh menjadi pelaku usaha yang produktif.
- c. Bersama dengan pelaku usaha atau UMKM, melakukan evaluasi atas proses pendampingan, terutama mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan pendampingan.
- d. Menyusun laporan kegiatan pendampingan, mulai dari tahapan persiapan sampai akhir kegiatan pendampingan.

Tanggung jawab seorang pendamping ketika melakukan kegiatan pendampingan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan pendamping terhadap fungsi pelaksanaan pendampingan, dimana, kapan, untuk apa, dan untuk siapa pendampingan dilakukan. Tujuan, dan fungsi pendampingan sangat tergantung pada konteks permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha atau UMKM.

Adapun kekuatan merupakan kelebihan dari pelaksanaan program pelaksanaan pendampingan KUR saat ini yaitu:

1. Program pelaksanaan pendampingan KUR adalah program yang dirancang pemerintah dengan tujuan membantu para pelaku usaha yang berskala kecil menengah salah satunya yaitu ditujukan kepada pelaku usaha atau UMKM dengan penjaminan yang dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini

Pemerintah menjamin program pelaksanaan pendampingan KUR dengan harapan dapat membantu UKM untuk masalah permodalan dan investasi usaha yang selama ini menjadi penghambat dalam pengembangan dan peningkatan usaha.

2. Pemanfaatan dana pinjaman dari program pelaksanaan pendampingan KUR yang baik berdampak terhadap peningkatan usaha penerima pinjaman KUR ini.
3. Proses pelaksanaan program pendampingan KUR tergolong cepat. Hal ini tercipta karena adanya dukungan dari pemerintah sebagai perancang dan Koperasi sebagai pelaksana pendamping Program KUR.

Adapun kelemahan merupakan kekurangan dari pelaksana Program Pendamping KUR yaitu:

1. Sosialisasi yang belum maksimal masih dirasakan oleh sebagian pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pendampingan KUR.
2. Penyebaran Program Pendampingan KUR yang belum merata sampai kedaerah-daerah, hal ini terlihat dari pelaksanaan program pendampingan KUR yang masih terpusat pada kota-kota dan belum mencapai ke pelosok daerah.

Peluang merupakan kesempatan untuk pengembangan pelaksanaan Program Pendampingan KUR

1. Jumlah pelaku usaha atau UMKM yang jumlahnya semakin banyak menjadi kesempatan Pemerintah untuk memperbesar penyerapan program KUR

2. Meningkatnya pemahaman mengenai program Pendamping KUR menunjukkan bahwa program KUR menarik perhatian pelaku usaha.

Ancaman ialah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup pelaksanaan Program Pendampingan KUR yaitu:

1. Persyaratan dan prosedur yang memberatkan mengakibatkan para calon debitur atau pelaku usaha sulit mendapatkan dana KUR
2. Terdapat agunan sebagai penjaminan dari debitur. Kebijakan ini ditetapkan oleh Bank pelaksana sebagai tindakan aman apabila terjadi kredit macet yang terjadi akibat debitur terhambat mengembalikan dana pinjaman program KUR.

Adapun dukungan nyata Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ialah dengan memberikan informasi sosialisasi penyuluhan sosialisasi.²

1. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Dalam Pelaksanaan Program Pendampingan KUR.

Berperan dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja selaku SKPD yang berwenang dan berkompeten melaksanakan atau bertanggung jawab terhadap program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bank-bank pelaksana seperti bank-bank pemerintah dan bank swasta lainnya sebagai pelaksana atau penyandang KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan melalui kegiatan-

² Dra. Marta Darmayanti, *Pelaksana Perijinan dan Kerjasama* Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 15 Nopember 2018.

kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka seperti melakukan sosialisasi tentang program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada para pelaku usaha di kota Banjarmasin.³ Pengaruh program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap peningkatan perekonomian di kota Banjarmasin sangat luar biasa dirasakan serta sangat membantu pemberdayaan usaha. Program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dirasa sudah tepat sebagai dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat)

a. Faktor Pendukung Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Faktor pendukung peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan Program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di kota Banjarmasin. Dengan adanya tersedia dana melalui anggaran APBD kota Banjarmasin berupa kegiatan sosialisasi tentang program KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada masyarakat dengan maksud agar masyarakat bisa mengetahui tentang keberadaan program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat) ini secara luas.

Adanya juga dukungan dari pemerintah pusat dalam kementerian koperasi yang selalu intens melaksanakan kegiatan program

³ Isnawati, *Pelaksana UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi*, 19 Nopember 2018

pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan selalu memantu perkembangan pelaksanaannya sehingga menjadi motivasi tersendiri.

Bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja untuk menjalankan program Pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan sebaik-baiknya serta adanya kerjasama yang baik dengan Dirjen anggaran kementerian keuangan dalam hal memantau calon-calon debitur KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui binaan-binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Adanya perpres 98 th 2015 tentang pelaksanaan izin usaha mikro kecil yang kewenangan di limpahkan kepada kecamatan membuat Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja merasa sangat terbantu untuk mendapatkan data calon-calon debitur yang potensial sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi bank pelaksana untuk memberikan pinjaman atau menyalurkan kreditnya kepada masyarakat.

b. Faktor Penghambat Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam Pelaksanaan Program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Adapun faktor penghambat peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin dalam Pelaksanaan Program Pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat)

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya atau tugasnya dalam menangani tugasnya.

- 2) Minimnya anggaran yang tersedia untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dilaksanakan oleh Bank pemerintah atau swasta.
- 3) Belum adanya koperasi-koperasi yang bisa menjadi pelaksana KUR (Kredit Usaha Rakyat) padahal banyak anggota-anggotanya yang memiliki usaha produktif sementara koperasi sebagai badan hukum diperbolehkan menjadi pelaksana program tersebut. Sebab persyaratan untuk menjadi pelaksana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dirasa terlalu berat.⁴

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah ditemukan penyajian data, maka laporan penelitian dalam hal ini menjadi pokok pembahasan adalah menjawab yang telah ditetapkan penulis dalam penelitian ini:

1. Analisis peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam Pelaksanaan Program Pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin salah satunya adalah melakukan pemberdayaan pada UKM di Kota Banjarmasin yang telah tertuang dalam program kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Upaya yang

⁴ Dra. Marta Darmayanti, *Pelaksana Perijinan dan Kerjasama* Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 15 Nopember 2018.

dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin diharapkan dapat mendorong terwujudnya UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai mencari peserta dan penyandang dana kegiatan sosialisasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perijinan sangat membantu bagi pelaku UKM untuk memudahkan dalam mengakses Program Pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Iklim usaha yang baik akan berdampak pada peningkatan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, dengan kata lain iklim yang kondusif menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk berusaha di Kota Banjarmasin akan meningkat. Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan untuk mendukung iklim usaha di Kota Banjarmasin yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan.

Program pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah kredit atau pembiayaan kepada pelaku usaha dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari bank pelaksana.

Dengan adanya kegiatan tersebut akan memicu pertumbuhan UKM, kenaikan tersebut secara langsung akan memicu pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan pelaku UKM di Kota Banjarmasin juga tidak terlepas dari peran pemberdayaan Dinas Koperasi.

2. Analisis Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam Pelaksanaan Pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Adapun faktor pendukung peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

- a. Adanya dukungan dari perbankan kepada UKM terkait pemberian modal bagi pelaku UKM di Kota Banjarmasin yang sangat membantu pelaku UKM dalam meningkatkan usahanya.

Fasilitas dukungan yang diberikan oleh perbankan melalui mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat. Selain itu dengan dukungan tersebut membuat pangsa pasar produk UKM akan semakin terbuka dan kemampuan UKM untuk melaksanakan ekspansi pasar juga menjadi terbuka, serta mendorong terjadinya efisiensi kegiatan produksi bagi pelaku usaha sehingga kapasitas produksi baik dari kualitas dan kuantitas menjadi lebih baik oleh karena itu adanya penambahan modal untuk kegiatan produksi dari pemberian kredit dari bank pelaksana.

- b. Peran aktif dalam mendukung kegiatan pemberdayaan UKM yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam upaya memberdayakan pelaku usaha khususnya di Kota Banjarmasin.

Lembaga sangat penting dan menjadi mitra strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam pengembangan dan pembinaan pelaku usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut nampak ketika Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melakukan kegiatan pembinaan tidak mengalami kesulitan untuk menghubungi pelaku usaha karena pada umumnya para pelaku usaha terlibat secara keanggotaan dalam suatu lembaga.

Adapaun faktor penghambat peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

1. Keterlambatan dalam penyediaan anggaran untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan dukungan bagi pelaku usaha. Hal tersebut akan berdampak pada daya serap anggaran dan target realisasi kegiatan yang kurangmaksimal dan secara tidak langsung akan menyebabkan penurunan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat).
2. Terbatasnya jumlah pegawai penyuluh dari sisi kualitas maupun kuantitas penyuluhan itu sendiri. Dukungan dari *stakeholder* akan

sangat berpengaruh terhadap pembangunan SDM bagi pelaku usaha di Kota Banjarmasin yang akan berdampak pada pelaksanaan penyuluhan pendidikan dan pelatihan usaha menjadi kurang optimal karena pada pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil yang berupa pendidikan, pelatihan dan penyuluhan biasanya dilaksanakan oleh pegawai yang sekaligus merangkap menjadi penyuluh. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu kendala serius bagi perkembangan UKM di Kota Banjarmasin.